

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dimoderasi Oleh Peran Kepala Desa

M. Ulvi Anowta¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Indonesia

*Correspondences: niaga389.alas@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh kompetensi pengurus, partisipasi masyarakat, penggunaan teknologi informasi, terhadap pengelolaan Bumdes dan mengetahui apakah kompetensi pengurus, partisipasi masyarakat, penggunaan teknologi informasi yang dimoderasi peran kepala desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Bumdes. Populasi dalam penelitian ini seluruh BUMDes di Kabupaten Sumbawa Barat dengan menggunakan metode *Stratified Random Sampling* yang dikelompokkan pada strata berkembang, aktif, tumbuh dengan jumlah 21 BUMDes. Penentuan sampel yang terdiri pengurus dari BUMDes yaitu ketua, sekretaris dan bendahara dengan jumlah sampel dalam penelitian ini 36 orang yang mempresentasikan 23 persen dari populasi. Alat analisis data yang digunakan adalah SPSS 17. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi pengurus tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Partisipasi masyarakat, penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Peran kepala desa tidak memperkuat pengaruh kompetensi pengurus terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes, tetapi peran kepala desa mampu memoderasi pengaruh partisipasi masyarakat dan pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

Kata Kunci: Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes.

Analysis of Factors Affecting Management Accountability of Village-Owned Enterprises Moderated by the Role of the Village Head

ABSTRACT

The research aims to analyze the influence of management competency, community participation, use of information technology, on the management of Bumdes and find out whether management competency, community participation, use of information technology are moderated by the role of the village head on the accountability of Bumdes management. The population in this study were all BUMDes in West Sumbawa Regency using the Stratified Random Sampling method which was grouped into developing, active, growing strata with a total of 21 BUMDes. Determination of the sample consisting of administrators from BUMDes, namely the chairman, secretary and treasurer with the total sample in this study being 36 people representing 23 percent of the population. The data analysis tool used is SPSS 17. The research results show that management competency does not have a significant effect on the accountability of BUMDes management. Community participation and the use of information technology have a positive and significant effect on the accountability of BUMDes management. The role of the village head does not strengthen the influence of administrator competence on BUMDes management accountability, but the role of the village head is able to moderate the influence of community participation and the influence of information technology on BUMDes management accountability.

Keywords: Accountability of BUMDes Management.

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 12
Denpasar, 30 Desember 2023
Hal. 3316-3333

DOI:
10.24843/EJA.2023.v33.i12.p15

PENGUTIPAN:
Anowta, M. U. (2023). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dimoderasi Oleh Peran Kepala Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(12), 3316-3333

RIWAYAT ARTIKEL:
Artikel Masuk:
30 November 2023
Artikel Diterima:
25 Desember 2023

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, desa menjadi wilayah terkecil dari sistem pemerintahan. Melalui desa, pemerintah pusat mampu menerapkan kebijakannya tanpa harus turun ke lapangan secara langsung dan cukup dengan memberikan pelimpahan wewenang dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota/kabupaten dan kemudian ke pemerintah desa. Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang terlibat langsung dengan masyarakat setempat, sehingga keterlibatan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan yang telah dikeluarkan. Lahirnya BUMDes didasari oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2014 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes.

Bentuk peningkatan sektor usaha ekonomi masyarakat di desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dapat ditempuh melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan sebuah lembaga yang hadir di tengah masyarakat yang sudah berbadan hukum menurut Suparji, (2019:1). BUMDes adalah sistem kegiatan masyarakat bersama pemerintah desa dan pengelolaannya terpisah dari kegiatan pemerintahan desa. BUMDes selanjutnya dibentuk dengan mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di bidang ekonomi dan meningkatkan PADes. Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa.

Memperhatikan besarnya peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberikan alternative pada beberapa program pendampingan maupun hibah, maka perlu adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi : Pengelolaan BUMDes harus terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat. Pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku. Masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan Pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga secara berkelanjutan.

Akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang atau suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya. Menurut Mardiasmo, (2009), Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Peningkatan kemampuan dan kompetensi perangkat desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, hal tersebut tak lain agar tercapainya

akuntabilitas pengelolaan dana desa yang akan berdampak langsung terhadap tata kelola pemerintahan desa yang baik (Permendagri 113 tahun 2014). Evaluasi terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes dirasa penting agar dapat mengetahui sejauhmana pengurus BUMDes memberikan pertanggungjawabannya. Salah satu yang menjadi dampak yang besar dalam pengelolaan BUMDes adalah lemahnya akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) disebutkan, Pemerintah Daerah kabupaten Sumbawa Barat belum memiliki kebijakan yang lengkap dan selaras dengan dana desa. BPK menilai Pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan penggunaan dana desa dalam rangka pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Sedangkan dari hasil observasi pra penelitian ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat diperoleh data bahwa jumlah BUMDes sebanyak 57 BUMDes yang terdiri dari: 1 BUMDes status berkembang, 8 BUMDes status aktif, 3 BUMDes status tumbuh, sisanya sebanyak 45 BUMDes tidak beroperasi.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kumalasari, (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi aparat dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Untuk pengujian dengan model Moderate Regression Analysis (MRA) diperoleh hasil peran kepala desa mampu memoderasi pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi aparat, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. (Imamuddin, 2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dapat memajukan BUMDes. Hasil uji tidak sejalan dengan penelitian Syamsi, (2014) dimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran BUMDes masih lemah baik dari segi pikiran, tenaga, keahlian dan waktu. Suwandi, (2015) yang meneliti tentang partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa masih kurang.

Pengaruh penerapan sistem teknologi informasi juga memiliki peranan cukup penting dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Sistem adalah suatu entitas yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan (Mukhtar, 2002:3). Peneliti yang meneliti penerimaan penggunaan sistem teknologi informasi dilakukan oleh Lusiono & Suharman, (2017), Juardi et al., (2018) dan Nintyari, (2019) dimana penggunaan system teknologi informasi dinyatakan mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan BUMDes. Penelitian tentang teknologi informasi juga dilakukan oleh Wardani et al., (2019) yang menyatakan hasil yang berbeda bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan BUMDes.

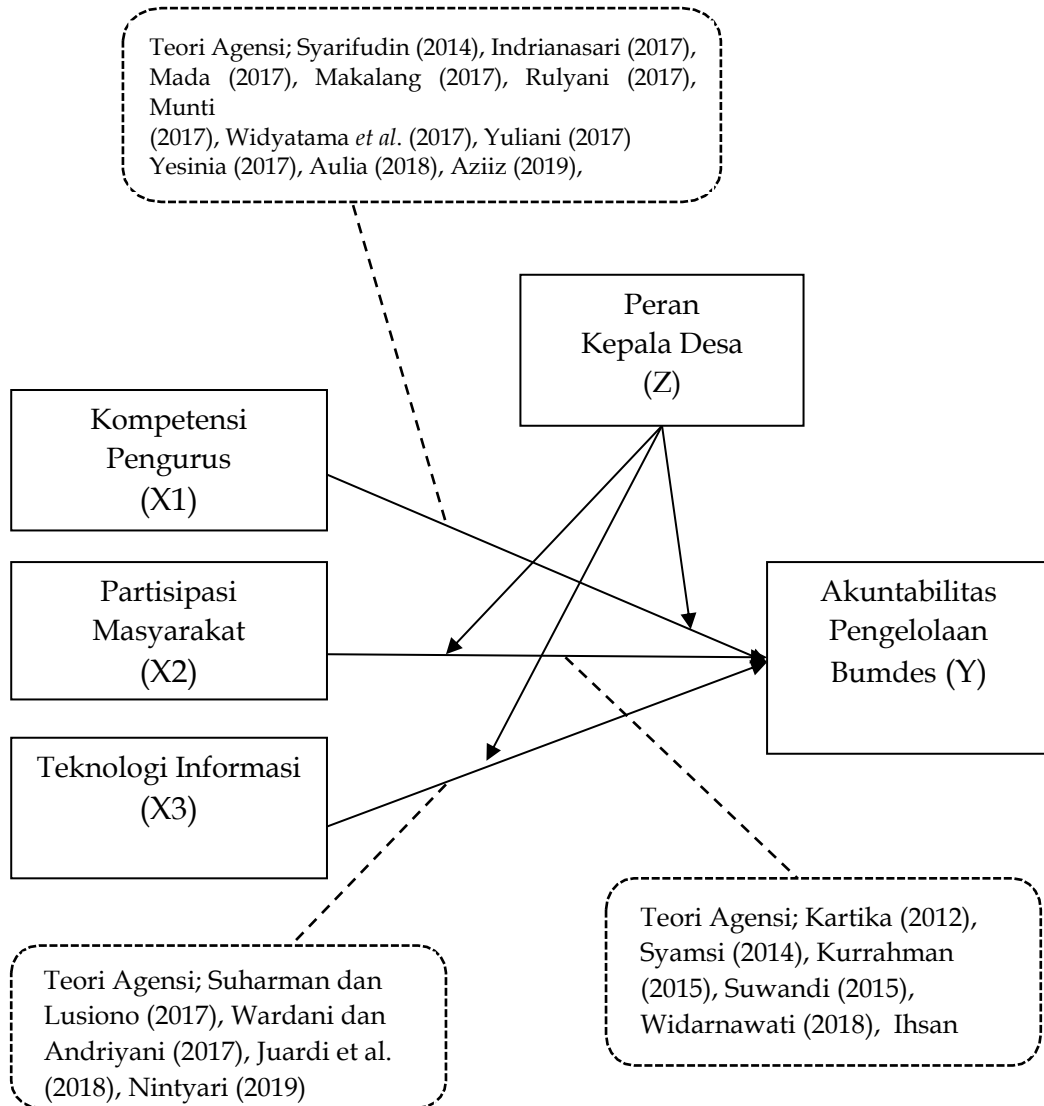
Rindi et al., (2017) menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala dalam pengelolaan BUMDes. Sukriani et al., (2018) menyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, variabel penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. Idward, (2017) meneliti tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, dan akuntabilitas terhadap Laporan Keuangan Daerah dengan Sistem

Pengendalian Intern sebagai Pemoderasi (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa). Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda tersebut menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Persamaan dari penelitian ini adalah pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Adapun perbedaannya terdapat pada variabel terikat Kualitas Laporan Keuangan sedangkan pada penelitian ini variabel terikatnya Akuntabilitas Pengelolaan Bumdes.

Penelitian terdahulu yang telah diuraikan menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian (*gap research*) tentang faktor-faktor penentu akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Hal ini menjadi salah satu alasan peneliti untuk menguji dan menganalisa kembali pengaruh kompetensi pengurus, partisipasi masyarakat, dan penggunaan teknologi informasi sebagai faktor penentu akuntabilitas pengelolaan BUMDes di Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini mengeksplorasi faktor penentu akuntabilitas pengelolaan BUMDes, serta mengelaborasi pengaruh peran kepala desa apakah mampu memoderasi kompetensi pengurus, partisipasi Masyarakat, penggunaan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Peneliti sebelumnya cenderung menguji akuntabilitas pengelola dana desa dan kualitas laporan keuangan desa sedangkan dalam penelitian ini variabel-variabel independen akan diukur kembali dengan Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes. Selanjutnya penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, yang penelitian sebelumnya tentang pengelolaan BUMDes banyak dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu : *Satu*, apakah kompetensi pengurus berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. *Kedua*, apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. *Ketiga*, apakah penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Peran kepala desa mampu memoderasi kompetensi pengurus, partisipasi masyarakat, penggunaan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi pengurus, partisipasi masyarakat, penyelesaian penggunaan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Lebih lanjut tujuan penelitian ini adalah untuk menguji peran kepala desa mampu memoderasi kompetensi pengurus, partisipasi masyarakat, penggunaan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yaitu penggunaan teori agensi dapat memberikan pemahaman kepada BUMDes untuk menghindari adanya konflik kepentingan, maka BUMDes harus memberikan informasi yang dimiliki Lembaga sesuai kebutuhan, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengurus BUMDes untuk terus mengelola BUMDes sesuai yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes, dan juga Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi rujukan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun aturan-aturan terbaru terkait pengelolaan BUMDes, misalnya PermenDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4

tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2022

Hayati *et al.*, (2020) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan dan kompetensi pengelola berpengaruh positif terhadap tata kelola BUMDes; Gaya kepemimpinan dan kompetensi pengelola berpengaruh positif terhadap penguatan ekonomi desa di KBB secara tidak langsung melalui tata kelola BUMDes.; dan Tata kelola BUMDes berpengaruh positif terhadap penguatan ekonomi desa di KBB. Filya, (2018) menyatakan bahwa pengelolaan BUMDes sudah berjalan baik namun masih belum optimal, dikarenakan belum terpenuhi beberapa indikator yaitu tenaga kerja, modal, pangsa pasar, akuntabel dan peningkatan laba/rugi. Ihsan, (2018) menyatakan bahwa BUMDes Gerbang Lentera merupakan salah satu BUMDes yang pengelolaannya sudah baik di

Kabupaten Semarang sehingga menjadi rujukan desa lain untuk berkunjung dan studi banding. Proses pengelolaan BUMDes berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan didirikannya BUMDes. Kumalasari, (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi aparat dan system pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Mahmudah, (2018) menyatakan bahwa unit kegiatan Bumdes desa Sungonlegowo sudah berkembang cukup pesat, meski ada 2 kegiatan yang baru memulai karena masih relatif baru yaitu PPOB dan simpan pinjam. Fatimah, (2018) menyatakan bahwa Sistem Q-BUMDES membentuk suatu sistem basis data terpadu untuk melakukan pengendalian kualitas sehingga wirausaha desa dapat lebih adaptif kesejahteraannya. Idward, (2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Rindi et al., (2017) mengatakan bahwa sumber daya manusia yang terbatas dan keterbatasan alat merupakan kendala dalam pengelolaan BUMDes

Jensen & Meckling, (1976) mendefinisikan Konsep *Agency Theory* yaitu hubungan atau kontrak antara principal dan agen. Principal memperkerjakan agen untuk melakukan tugas dalam rangka memenuhi kepentingan principal. Perspektif dari *agency theory* mengindikasikan bahwa untuk mampu memenuhi tuntutan informasi dan pertanggungjawaban yang akuntabel dari para agent (Pengurus) yang telah dipercayakan oleh principal (Pemerintah Desa dan Masyarakat) melalui BUMDes, dan tidak terlepas dari perilaku individu (pengurus) yaitu pengurus dalam melaksanakan pengelolaan sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang dimilikinya.

Perspektif dari teori *agency* mengindikasikan bahwa untuk mampu memenuhi tuntutan informasi dan pertanggungjawaban yang akuntabel dari para agent (Pengurus) yang telah dipercayakan oleh principal (Pemerintah Desa dan Masyarakat) melalui BUMDes, dan tidak terlepas dari perilaku individu (pengurus) sebagaimana diungkapkan dalam teori atribusi (*dispositional attributions*) yaitu pengurus dalam melaksanakan pengelolaan sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang dimilikinya. Berdasarkan definisi kompetensi yang menyebutkan bahwa suatu pekerjaan harus dilakukan secara profesional oleh orang yang mempunyai kompetensi supaya hasil pekerjaannya sesuai dengan yang diinginkan serta hasil pekerjaannya rapi dan memuaskan. Penelitian yang dilakukan Sukarini & Dewi, (2018) menyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, variabel penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. Logikanya, semakin tinggi kompetensi sumber daya yang dimiliki para pengurus BUMDes, semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan Dana BUMDes yang dihasilkan oleh BUMDes tersebut. Berdasarkan grand teori, penelitian terdahulu dan logika berpikir, maka bentuk hipotesis nya adalah:

H₁: Kompetensi Pengurus berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

Partisipasi masyarakat menurut Adisasmita, (2006) adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan

implementasi program/proyek pembangunan dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan. Dalam hal akuntabilitas pengelolaan BUMDes, masyarakat berhak berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan BUMDes. Penelitian yang dilakukan oleh Ihsan, (2018) menyatakan bahwa faktor-faktor baiknya pengelolaan BUMDes Gerbang Lentera antara lain Sumber daya yang tersedia, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dukungan pemerintah dan adanya kerjasama dengan pihak ketiga. Logikanya bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin akuntabel pengelolaan BUMDes. Berdasarkan grand teori, penelitian terdahulu dan logika berpikir tersebut diatas, maka bentuk hipotesisnya :

H₂: Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes

Konsep *Agency Theory* adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agen. Principal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas dalam rangka memenuhi kepentingan principal. Kepentingan principal untuk memperoleh informasi atas akuntabilitas pengelolaan BUMDes dapat disampaikan oleh agen melalui penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi merupakan sebuah kegiatan yang merencanakan, mengkoordinasikan, mengimplementasikan, dan mengendalikan segenap tenaga dan pikiran sebagai upaya untuk melaksanakan kegiatan operasional BUMDes secara efektif dan efisiensi. Pemanfaatan teknologi dalam sebuah entitas akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan. Logikanya, semakin baik pengelola memanfaatkan teknologi informasi yang diterapkan di BUMDes maka akan semakin baik akuntabilitas pengelolaan Dana BUMDes yang akan dihasilkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Idward, (2017) dengan analisis regresi linear berganda menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Berdasarkan grand teori, penelitian terdahulu dan logika berpikir diatas, maka bentuk hipotesisnya adalah:

H₃ : Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

Teori keagenan (*Agency Theory*) yaitu menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu principal dan agent. *Agency theory* adalah teori yang menegaskan atau menjelaskan tentang perbedaan kepentingan antara principal (pemberi amanah) dengan agen (pelaksana). Rudana, (2005:6) menjelaskan bahwa kompetensi merujuk kepada pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skills*) dan kemampuan (*abilities*), yang dapat didemonstrasikan yang dilakukan dengan standar tertentu. Kompetensi dapat diobservasi, merupakan tindakan perilaku yang memerlukan kombinasi dari ketiga hal ini. Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi. Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Mada et al., (2017). Hasil penelitian menyatakan bahwa kompetensi pengurus merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas

dan transparansi dalam sebuah BUMDes maka banyak faktor yang dapat mempengaruhi kedua aspek tersebut, diantaranya yaitu kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa turut mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BUMDes. Berdasarkan grand teori, penelitian terdahulu dan logika berpikir diatas, maka bentuk hipotesisnya adalah:

H₄: Peran kepala desa mampu memoderasi kompetensi pengurus terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes

Akuntabilitas menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kesejahteraan masyarakat. Keputusan yang akan diambil oleh pengelola BUMDes haruslah melibatkan masyarakat. Hidayah (2017) menyatakan bahwa dalam proses perencanaan program penggunaan dana desa di wilayah Wonodadi telah melaksanakan prinsip partisipatif. Menurut Juwita (2014) perencanaan anggaran memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas public di provinsi Banten. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Umaira & Adnan (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Medianti (2018), menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari partisipasi terhadap akuntabilitas dana desa, hal ini dibuktikan dengan semakin meningkat partisipasi masyarakat, maka semakin tinggi jumlah individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut dengan kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi keterlibatan individu tersebut maka semakin tinggi pula rasa tanggung jawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan.

Berdasarkan grand teori, penelitian terdahulu dan logika berpikir diatas, maka bentuk hipotesisnya adalah:

H₅: Peran kepala desa mampu memoderasi partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes

Dengan adanya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal. Lusiono & Suharman, (2017) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu sumber daya manusia dalam proses akuntansi dan dapat mengurangi kesalahan dalam proses akuntansi dan dapat mengurangi kesalahan dalam pemrosesan data, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan BUMDes sebagai bentuk pelaksanaan *agency theory*, dimana masyarakat desa sebagai *principal* memberikan kepercayaan kepada pengurus BUMDes sebagai *agen* untuk melaksanakan penatausahaan keuangan BUMDes yang akuntabel yang mudah dipahami baik oleh pemberi maupun penerima informasi keuangan. Berdasarkan grand teori, penelitian terdahulu dan logika berpikir diatas, maka bentuk hipotesisnya adalah:

H₆ : Peran kepala desa mampu memoderasi penggunaan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dengan bantuan instrumen kuesioner terkait variabel penelitian.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Pengurus BUMDes yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah 40. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Stratified Random*, Sampel akan diambil berdasarkan strata : berkembang, aktif, tumbuh, dengan jumlah sebagai berikut : 1 BUMDes status berkembang, 8 BUMDes status aktif, 3 BUMDes status tumbuh, total berjumlah 12 BUMDes.

Kompetensi Pengurus Menurut Palan, (2007:5) mendefinisikan kompetensi sebagai deskripsi yang merujuk kepada karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai nilai, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang yang berkinerja unggul didalam organisasi. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*cability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kompetensi dapat diukur dengan indikator keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan.

Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat menurut Adisasmita, (2006) adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat diukur dengan indikator partisipasi Masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, partisipasi dalam memanfaatkan hasil dan partisipasi dalam evaluasi.

Teknologi Informasi Menurut Brown et al., (2005) Teknologi Informasi adalah kombinasi dari teknologi komputer yang tersusun dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk memproses dan juga menyimpan teknologi komunikasi informasi untuk melakukan distribusi informasi. Indikator variabel teknologi informasi yaitu ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak, kemudahan operasional perangkat lunak dan jaringan komunikasi.

Akuntabilitas pengelolaan Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Sehingga indikator akuntabilitas pengelolaan BUMDes yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable.

Peran kepala desa Peran menurut Soekanto, (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, dan juga ikut dalam melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Peran kepala desa dalam pengelolaan BUMDes yaitu memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes, dan mengendalikn pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan software *SPSS versi 17*. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis

statistik deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:206).

Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrument penelitian dapat dievaluasi melalui uji reliabilitas dan validitas. Uji tersebut masing-masing mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrument. Terdapat dua prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji kualitas data, yaitu (1) uji reliabilitas dengan melihat koefisien (*Cronbach Alpha*), dan (2) uji validitas dengan melakukan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor item pertanyaan dengan total skor seluruh pertanyaan setiap observasi.

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran terhadap konsistensi, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan instrument (kuisisioner) yang sama. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu alat ukur dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 untuk setiap kuisisioner masing-masing variabel (Ghozali, 2016:48).

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur kualitas kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuisisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur (Ghozali, 2016:53). Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor masing-masing item pertanyaan terhadap skor total tiap observasi.

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian hanya meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Sementara uji autokorelasi tidak digunakan karena penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk kuisisioner yang tidak berhubungan dengan rentang waktu.

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Penelitian ini menggunakan uji statistik yang dapat dilakukan dengan uji statistic non parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S) untuk lebih meyakinkan hasil dari analisis grafik (Ghozali, 2016:154).

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melihat nilai tolerance dan lawannya atau dengan melihat nilai variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan variable bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2016:103).

Uji heteroskedastisitas bertujuan mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2016:134). Model regresi yang baik adalah yang homoskedisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap.

Pengujian untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *Glejser*. Data dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas apabila secara statistik

variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat *Absolut Ut* (AbsUt). Model regresi tidak mengandung heteroskedasititas jika probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%.

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan model analisis *Moderating Regression Analysis* (MRA). MRA merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (Ghozali, 2016:164). persamaan model regresi secara sistematis sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4Z + \varepsilon \dots\dots\dots (2)$$

$$Y = a + b_1X_1 + b_2Z + b_3X_1Z + \varepsilon \dots\dots\dots (3)$$

$$Y = a + b_1X_2 + b_2Z + b_3X_2Z + \varepsilon \dots\dots\dots (4)$$

$$Y = a + b_1X_3 + b_2Z + b_3X_3Z + \varepsilon \dots\dots\dots (5)$$

Dimana :

- Y = akuntabilitas pengelolaan BUMDes
- a = Konstanta
- b = Koefisien Regresi
- X1 = Kompetensi Pengurus
- X2 = Partisipasi Masyarakat
- X3 = Penggunaan Teknologi Informasi
- Z = Peran Kepala Desa
- E = error

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2016:95). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji *goodness of fit* digunakan untuk mengetahui apakah model penelitian mampu memprediksi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2016:96). Uji *goodness of fit* dapat dilihat dari perbandingan besaran nilai probabilitas (*p-value*) dengan tingkat signifikan 5% (0,05). Ketentuan yang digunakan dalam uji *goodness of fit* adalah apabila signifikansi kurang dari 0,05 dan F hitung lebih besar dari F table (Ghozali, 2016:96).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil pengujian hipotesis variabel Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes, Kompetensi Pengurus, Partisipasi Masyarakat, Teknologi Informasi dan Peran Kepala Desa yang disajikan pada Tabel 1.

Pada uji normalitas nilai Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,855 (persamaan regresi 1), 0,906 (persamaan regresi 2), 0,914 (persamaan regresi 3), 0,799 (persamaan regresi 4) dan 0,799 (persamaan regresi 5). Karena nilai asymp pada penelitian ini lebih dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa residual terdistribusi secara normal. Untuk uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance variabel independen yaitu kompetensi pengurus, partisipasi masyarakat dan teknologi informasi serta variabel moderasi peran kepala desa > 0,10, tidak terdapat korelasi antara variabel

bebas. Selain itu nilai VIF sebesar lebih kecil dari 10,00. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas. Pada uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, dimana kompetensi pengurus dengan signifikansi sebesar 0,521, partisipasi masyarakat dengan signifikansi sebesar 0,774, teknologi informasi dengan nilai signifikansi sebesar 0,270 dan peran kepala desa memiliki nilai signifikansi sebesar 0,561. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

1.	Uji Normalitas	Kolmogorov- Smirnov Z	Asymp. Sig.
	Persamaan Regresi 1	0,697	0,855
	Persamaan Regresi 2	0,566	0,906
	Persamaan Regresi 3	0,558	0,914
	Persamaan Regresi 4	0,645	0,799
	Persamaan Regresi 5	0,502	0,963
2.	Uji Multikolinearitas	Tolerance	VIF
	Kompetensi Pengurus (X1)	0,699	1,431
	Partisipasi Masyarakat (X2)	0,460	2,174
	Tekhnologi Informasi (X3)	0,437	2,287
	Peran Kepala Desa (Z)	0,506	1,978
3.	Uji Heteroskedastisitas	t	Sig.
	Kompetensi Pengurus (X1)	0,649	0,521
	Partisipasi Masyarakat (X2)	0,289	0,774
	Tekhnologi Informasi (X3)	1,120	0,270
	Peran Kepala Desa (Z)	0,587	0,561

Sumber: Data Penelitian, 2022

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kompetensi pengurus berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Tabel 2 menunjukkan nilai t-statistik untuk pengaruh kompetensi pengurus terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes adalah 1,352. Nilai ini lebih kecil dibandingkan t tabel pada level signifikansi 0,05 yaitu 1,67 sehingga dapat disimpulkan hipotesis ditolak. Nilai sig. untuk pengaruh kompetensi pengurus terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes sebesar 0,185 lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,122 sehingga hipotesis ditolak. Hal ini berarti kompetensi pengurus tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Artinya semakin baik kompetensi pengurus tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes semakin tinggi partisipasi masyarakat semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Tabel 2 menunjukkan nilai t-statistik untuk pengaruh partisipasi masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes adalah 3,110. Nilai ini lebih besar dibandingkan t tabel pada level signifikansi 0,05 yaitu 1,67 sehingga dapat disimpulkan hipotesis diterima. Nilai sig. untuk pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,291 sehingga hipotesis diterima. Dimana partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Artinya semakin tinggi partisipasi masyarakat maka semakin tinggi Akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori

agensi yang menjelaskan bahwa pemerintah desa selaku agen yang mengelola keuangan desa diberikan amanat oleh masyarakat atau principal untuk mengelola keuangan desa seringkali tidak transparan karena itu partisipasi masyarakat dalam mengontrol proses dan pelaksanaan pengelolaan keuangan harus lebih ditingkatkan untuk menghindari terjadinya kecurangan, Karena sifat dasar manusia dan akibat kewenangan yang diberikan cenderung untuk mementingkan diri sendiri yang bisa berakibat pada *conflict of interest*. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yaitu Kartika (2012), Syamsi (2014), Kurrahman (2015), Suwandi (2015), Widarnawati (2018), Ihsan (2018) dan Dewi & Gayatri (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error	Beta			
Kompetensi Pengurus (X1)	0,122	0,090	0,124	1,352	0,185	Ditolak
Partisipasi Masyarakat (X2)	0,291	0,094	0,328	3,110	0,004	Diterima
Teknologi Informasi (X3)	0,538	0,104	0,557	5,155	0,000	Diterima
Kompetensi Pengurus* Peran Kepala Desa	0,065	0,087	-1,692	-0,741	0,463	Ditolak
Partisipasi Masyarakat*Peran Kepala Desa	0,096	0,044	2,319	2,171	0,037	Diterima
Teknologi Informasi*Peran Kepala Desa	0,076	0,042	1,793	1,835	0,045	Diterima

Sumber: Data Penelitian, 2022

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Tabel 2 menunjukkan nilai t-statistik untuk pengaruh teknologi informasi terhadap Akuntabilitas pengelolaan BUMDes adalah 5,155. Nilai ini lebih besar dibandingkan t tabel pada level signifikansi 0,05 yaitu 1,67 sehingga dapat disimpulkan hipotesis diterima. Nilai sig. untuk pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,538 sehingga hipotesis diterima. Dimana teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Artinya semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Suharman dan Lusiono (2017), Wardani dan Andriyani (2017), Juardi et al (2018) dan Nintyari (2019) yang menemukan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Teknologi Informasi adalah kombinasi dari teknologi komputer yang tersusun dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk memproses dan juga menyimpan

teknologi komunikasi informasi untuk melakukan distribusi informasi yang dinilai dengan adanya ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak, adanya kemudahan operasional perangkat lunak, dan adanya jaringan komunikasi.

Hipotesis keempat menyatakan bahwa peran kepala desa mampu memoderasi kompetensi pengurus terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Tabel 2 menunjukkan nilai t-statistik untuk pengaruh kompetensi pengurus terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes adalah 0,741. Nilai ini lebih kecil dibandingkan t tabel pada level signifikansi 0,05 yaitu 1,67 sehingga dapat disimpulkan hipotesis ditolak. Nilai sig. Untuk peran kepala desa pengaruh kompetensi pengurus terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes sebesar 0,463 lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis ditolak. Hal ini berarti peran kepala desa tidak memperkuat pengaruh kompetensi pengurus terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Dapat disimpulkan bahwa variabel moderasi kompetensi pengurus terhadap peran kepala desa merupakan variabel moderasi prediksi (*predictor moderator*) karena nilai koefisien b_4 signifikan dan b_3 tidak signifikan. Sehingga variabel peran kepala desa tidak bisa menjadi variabel moderasi, namun dapat menjadi variabel independen. Peran kepala desa dalam pengelolaan BUMDes diantaranya memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes. Hasil pengujian ini selaras dengan beberapa penelitian sebelumnya. Syaripudin (2014) mengungkapkan bahwa peran kepala desa memperlemah kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Selanjutnya Widyatama *et al.* (2017) juga mengungkapkan peran kepala desa terhadap kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Hipotesis kelima menyatakan bahwa peran kepala desa memoderasi partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Tabel 2 menunjukkan nilai t- statistik untuk peran kepala desa memperkuat partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes adalah 2,171. Nilai ini lebih besar dibandingkan t tabel pada level signifikansi 0,05 yaitu 1,67 sehingga dapat disimpulkan hipotesis diterima. Nilai sig. untuk peran kepala desa memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes sebesar 0,037 lebih kecil dari 0,05, dengan koefisien sebesar 0,044 sehingga hipotesis diterima. Hal ini berarti peran kepala desa memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Dapat disimpulkan bahwa variabel moderasi partisipasi masyarakat terhadap peran kepala desa merupakan variabel moderasi semu (*quasi moderator*) karena nilai koefisien b_2 signifikan pada persamaan 2 dan b_3 signifikan pada persamaan 3. Sehingga variabel peran kepala desa mampu menjadi variabel moderasi. Hasil pengujian ini selaras dengan beberapa penelitian sebelumnya. Umaira & Adnan (2019) dan Medianti (2018) yang meneliti peran kepala desa dalam partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes, bahwa masyarakat berinisiatif besar untuk berkontribusi dalam pengelolaan alokasi BUMDes, tidak hanya dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan tetapi lebih penting adalah kesadaran masyarakat untuk terlibat langsung dalam membangun dan membesarkan BUMDes merupakan solusi yang

baik untuk memajukan pembangunan desa. Akuntabilitas pengelolaan BUMDes yang baik sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dan Kepala desa yang bertindak sebagai pemimpin dapat mempengaruhi bawahan/masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam program pengelolaan BUMDes yang dilaksanakan. Kepala desa memiliki kendali kontrol untuk meningkatkan dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan BUMDes dengan memberikan arahan tentang pentingnya pembangunan bagi kelangsungan hidup mereka.

Hipotesis keenam menyatakan bahwa peran kepala desa memperkuat pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Tabel 2 menunjukkan nilai t-statistik untuk peran kepala desa memperkuat teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes adalah 1,835. Nilai ini lebih besar dibandingkan t tabel pada level signifikansi 0,05 yaitu 1,67 sehingga dapat disimpulkan hipotesis diterima. Nilai sig. untuk peran kepala desa memperkuat pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes sebesar 0,045 lebih kecil dari 0,05, dengan koefisien sebesar 0,076 sehingga hipotesis diterima. Hal ini berarti peran kepala desa memperkuat pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Dapat disimpulkan bahwa variabel moderasi teknologi informasi terhadap peran kepala desa merupakan variabel moderasi semu (*quasi moderator*) karena nilai koefisien b_4 signifikan dan b_3 signifikan. Sehingga variabel peran kepala desa bisa menjadi variabel moderasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan *agency theory*, dimana masyarakat desa sebagai *principal* memberikan kepercayaan kepada pengurus BUMDes sebagai *agen* untuk melaksanakan penatausahaan keuangan BUMDes yang akuntabel yang mudah dipahami baik oleh pemberi maupun penerima informasi keuangan. Hasil penelitian ini didukung oleh Lusiono & Suharman (2017) yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu sumber daya manusia dalam proses akuntansi dan dapat mengurangi kesalahan dalam pemrosesan data, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi pengurus tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Peran kepala desa tidak memperkuat pengaruh kompetensi pengurus terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Peran kepala desa mampu memoderasi pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Peran kepala desa mampu memoderasi pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Keterbatasan penelitian ini terletak pada terbatasnya responden yang ada di BUMDes. Penelitian ini menggunakan sampel penelitian masih tergolong kecil mengingat waktu penelitian yang terbatas dan masih kurangnya literatur berupa penelitian terdahulu yang meneliti masalah.

Berdasarkan hasil dan kesimpulan diatas, maka saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat menjadikan variabel pengelolaan BUMDes secara umum dari sistem perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan

pertanggungjawaban BUMDes sebagai variable endogen agar memperoleh hasil yang lebih lengkap terhadap pengelolaan BUMDes. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian seperti BUMDes se pulau Lombok atau se provinsi NTB sehingga jumlah responden lebih besar, perbedaan karakteristik budaya lokal, luas wilayah, dan letak geografis dapat menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel penelitian.

REFERENSI

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Graha Ilmu.
- Brown, DeHayes, Hoffer, & Perkins. (2005). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta.
- Fatimah, P. L. R. (2018). Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-BUMDes) Untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur. *Jurnal Studi Pemuda*, 7, No.2.
- Filya, A. R. (2018). *Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan PADES di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariningsih. (2005). *Teknologi Informasi*. Graha Ilmu.
- Hatch, E., & Farhadi, H. (1981). *Variabel dalam Penelitian. Definisi Operasional Variabel Penelitian*. Undip.
- Hayati, M., Hanif, & Susilawati, D. (2020). Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Islamic Economics Journal*, 1, No 1 (TSSN: 2723-5955), 1-16.
- Hevesi, G. A. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Hutapea, P., & Thoah, N. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Revisi)*. PT. Bumi Aksara.
- Idward, N. N. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Pemoderasi (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa)* [Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/8057>
- Ihsan, A. (2018). *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep* [Universitas Diponegoro]. <http://ejournal3.undip.ac.id>
- Imamuddin. (2018). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Universitas Negeri Malang.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. BPFE.
- Isbandi, R., & Adi. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. FISIP IU Press.

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic*, 3(4), 305–360.
- Juardi, M. S. S., Muchlis, M., & Putri, R. A. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa. *Akuntansi Peradaban*, 4, No.1, 84–107.
- Kumalasari, L. (2018). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Peran Kepala Desa Sebagai Variabel Pemoderasi*. Universitas Widya Dharma.
- Lusiono, E. F., & Suharman. (2017). Analisis Penerimaan Aplikasi Siskeudes di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5 No. 2(E-ISSN: 2548-9836).
- Lyle M. Spencer, J. (2006). *Competence At Work Models for Superior Performance*. John Wiley & Sons.Inc.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill," Vol 8, No(2715–1859)*.
- Mahmudah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus:BUMDes Desa Sungon Legowo Bungah Gresik). *Jurnal Ecopreneur.12, Vol. 1, No.*
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik (IV)*. ANDI Offset.
- Miller, Rankin, & Neathey. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Sepuluh)*. Salemba Empat.
- Mukhtar, A. M. (2002). *Audit Sistem Informasi*. Rineka Cipta.
- Nintyari, L. R. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sosialisasi, Serta Manajemen Kontrol Terhadap Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Empiris Pada Desa-desa Penerima Dana Desa di Kabupaten Tabanan). *E-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 10, N.*
- Palan, R. (2007). *Competency Management*. PPM.
- Rindi, K., Dewi, L. P. M. S. A., Sari, D. A. P., & Awitiana, P. P. (2017). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada BUMDes Teja Kusuma. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7, No. 1.
- Rudana, N. (2005). *Pengaruh kompetensi dan komunikasi interpersonal terhadap kualitas pelayanan publik*. STIA LAN.
- Simarmata, J. (2006). *Pengamanan Sistem Komputer*. Andi.
- Soekanto, S. (2009). *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*. Rineka Cipta.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Rosdakarya.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukarini, L., & Dewi, P. E. D. M. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUMDes di Kecamatan Negara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9, No. 3.

- Sukriani, L., Dewi, P. E. D. M., & Wahyuni, M. A. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Laporan Keuangan Bumdes di Kecamatan Negara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9(3), 85–97.
- Suparji. (2019). *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*. UAI Press.
- Suryono, A. (2001). *Pemberdayaan Masyarakat*. CV. Citra Utama.
- Suwandi. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong (ADG) di Kantor Gampong Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara. *Jurnal Administrasi Negara*, 3(4)(1098–1108).
- Syamsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 3, No(ISSN. 2442-6962).
- Syarifudin, A., & Astuti, S. (2020). Strategi Pengembangan BUMDes Dalam Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa Dengan Pendekatan Social Entrepreneur di Kabupaten Kebumen. *Research Fair Unisri*, Vol 4, Num(ISSN: 2550-0171).
- Wardani, A. I., Kusumawardhani, D., & Rahmayanti, K. P. (2019). Perencanaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Fungsi Perencanaan BUMDes di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Administrasi Negara*, 7 No. 1(2598–4039), 67–77.
- Wazir, W. (1999). *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Sekretariat Bina Desa dengan dukungan.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi Keuangan Dan Keuangan Indonesia*, 02, No. 02(ISSN 2439 1381), 1–20.
- Wilkinson, Cerullo, Raval, & Wing, W. on. (2000). *Accounting Information Systems* (Fourth). John Wiley & Sons.
- Yuwono, T. (2001). *Manajemen Otonomi Daerah*. Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak).